

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membuat perusahaan tersebut memiliki poin yang tinggi dalam bidang bisnis perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak hanya menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, tetapi juga bertujuan menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Kelangsungan tersebut dipengaruhi oleh sumber modal atau pendanaan yang diterima untuk membuat perusahaan terus beroperasi secara maksimal. Laporan keuangan digunakan sebagai sarana oleh para pihak yang ingin memberikan sumber pendanaan untuk menyediakan informasi yang diperlukan terkait kinerja perusahaan dan digunakan juga sebagai pengambilan keputusan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (PSAK 01) Laporan Keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Menurut Bridwan (2004) laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan yang memiliki status wajar akan lebih dipercaya oleh para pihak yang berkepentingan untuk memberikan pendanaan atau penanaman modal. Utang usaha merupakan salah satu sumber pendanaan yang memiliki peranan besar dalam proses operasional suatu perusahaan.

Menurut Agoes (2017) utang usaha adalah kewajiban jangka pendek perusahaan kepada pihak ketiga, yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan satu tahun, biasanya menggunakan aset lancar perusahaan. Utang usaha juga biasanya dipengaruhi oleh volume transaksi yang tinggi dan karenanya sangat rentan terhadap salah saji. Tidak menutup kemungkinan manajemen suatu perusahaan untuk memanipulasi utang, karena dengan menetapkan utang terlalu rendah agar dapat melaporkan posisi keuangan yang lebih menguntungkan.

Perusahaan perlu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang merupakan pihak ketiga yang independen karena adanya peraturan dari pemerintah untuk menggunakan jasa audit. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 68 ayat 1 poin (c) bahwa direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila perseroan merupakan perseroan terbuka. Selain itu, jika tidak diaudit akan mengakibatkan adanya kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu perusahaan yang belum diaudit kurang dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk memeriksa utang usaha auditor harus melakukan prosedur yang disebut (*searching of unrecorded liabilities*) dengan cara memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Menurut Konrath dalam Agoes (2017), mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Agoes (2017) *substantive testing*, adalah penentuan jumlah dan jenis bukti serta penelaahan yang diperlukan agar auditor dapat memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. *Substantive testing* adalah pengujian substantif terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan.

PT. PNK Didirikan pada tahun 2000 adalah produsen dan pemasok produk makanan laut berkualitas tinggi di Indonesia dan memiliki berbagai jenis Makanan Laut Indonesia. PT PNK menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Jammaludin, Ardi, Sukimto & Rekan. Dalam proses auditing KAP JAS melakukan 4 tahap, yaitu, perikatan pada tahap ini auditor melakukan analisis keberlanjutan hubungan dengan klien, analisis kompetensi auditor, membuat surat perikatan, surat tugas, dan surat pernyataan independensi. Perencanaan auditor harus memahami entitas dan lingkungan klien, menentukan nilai materialitas, melakukan prosedur analitis awal, menentukan risiko pengendalian, dan risiko bawaan serta menentukan risiko salah

saji material. Setelah itu auditor akan memulai tahap pelaksanaan audit utang usaha melalui pengujian pengendalian, pengujian substantif, dan konfirmasi sehingga auditor berkesimpulan atas kewajaran akun yang diaudit. Finalisasi ditahap ini auditor memberikan opini terhadap laporan keuangan PT PNK yang telah selesai dilakukan audit. Dasar yang digunakan untuk menentukan kemungkinan salah saji material adalah total aset dan utang usaha.

PT PNK pada tahun 2021 mencatat utang usaha sebesar Rp. 4.994.709.033 jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 20% dari tahun tahun 2020 sebesar Rp. 4.172.354.651. Utang usaha pada PT PNK merupakan utang pembelian ikan dan biaya pengiriman ke gudang Perusahaan di Jakarta. Pengujian substantif utang usaha menjadi salah satu pengujian yang dapat digunakan oleh auditor untuk memeriksa kewajaran dan adanya salah saji atau *monetary errors*. Tujuan utama pengujian substantif terhadap utang usaha yakni untuk menemukan adanya *unrecorded liabilities*. Utang usaha merupakan salah satu sumber pendanaan yang memiliki peranan besar dalam proses operasional suatu perusahaan. Utang usaha juga biasanya dipengaruhi oleh volume transaksi yang tinggi dan karenanya sangat rentan terhadap salah saji. Tidak menutup kemungkinan manajemen suatu perusahaan untuk memanipulasi utang, karena dengan menetapkan utang terlalu rendah agar dapat melaporkan posisi keuangan yang lebih menguntungkan. Untuk mengetahui status kewajaran utang usaha pada laporan keuangan maka perlu dilakukan proses audit.

Berdasarkan latar belakang diatas dimana pengujian substantif lebih mendalam dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan utang usaha. Penulis ingin mengetahui proses audit yang dilakukan seperti apa, berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk Menyusun tugas akhir dengan judul **“AUDIT ATAS UTANG USAHA PT PNK OLEH KAP JAS & REKAN”**.

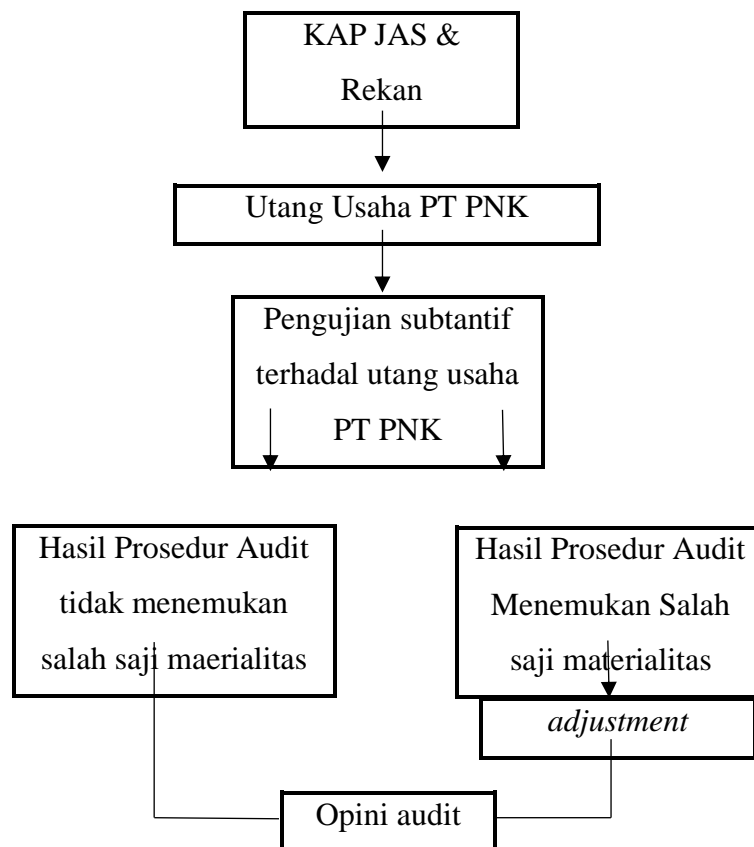
1.2 Tujuan

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan prosedur audit atas akun utang usaha yang dilakukan oleh KAP JAS pada PT PNK. Mengetahui hasil audit atas utang usaha yang dilakukan oleh KAP JAS pada PT PNK apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia yaitu, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam tugas akhir ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.4 Kontribusi

Adapun manfaat atau kegunaan tugas akhir ini adalah:

- a. Bagi Perusahaan

Laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana dan pembelajaran yang sekiranya dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan permasalahan utang usaha untuk dicarikon solusi yang terbaik bagi perusahaan.

b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan pembelajaran dan untuk menambah wawasan mengenai Audit Atas Utang Usaha PT PNK oleh KAP JAS & Rekan, serta dapat digunakan sebagai referensi dan informasi tambahan dalam penulisan dimasa yang akan datang.

c. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu yang sudah didapat selama magang di Kantor Akuntansi Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan serta membantu penulis memahami audit atas utang usaha dalam suatu perusahaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2010) Laporan Keuangan adalah kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Kasmir (2014) Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. secara umum ada macam jenis laporan keuangan yang bisa disusun, yaitu:

1. Laporan posisi keuangan (Neraca)
2. Laporan laba rugi komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana
5. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan dokumen dasar transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkasnya dalam catatan, hingga melaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan laporan keuangan merupakan aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasi, mencatat, meringkas, serta melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (PSAK 01) Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi, dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas.

Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (Rudianto, 2013).

2.2 Auditing

2.2.1 Definisi Audit

Menurut Mulyadi (2017), Auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014) Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses yang ditujukan untuk mendapatkan serta mengevaluasi bukti dengan objektif di dalam menentukan kesesuaian antara informasi yang diberikan dengan standar kriteria yang telah ditetapkan.

2.2.2 Jenis Audit

Menurut Mulyadi (2017) audit digolongkan menjadi 3: audit Laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional.

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit Laporan Keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Biasanya audit ini sering ditemukan dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah: mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

2.2.3 Tahap – Tahap Audit

Sebelum melaksanakan audit, auditor perlu mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolak perikatan audit (*audit engagement*) calon kliennya. Jika auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari calon kliennya, maka dalam melaksanakan audit ada beberapa tahap.

Menurut Mulyadi (2017) Proses audit atas laporan keuangan dibagi menjadi empat tahap berikut ini:

1. Penerimaan perikatan audit

Perikatan (*engagement*) adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut. Langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien berulang.

2. Perencanaan Audit

Setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya, langkah berikutnya yaitu merencanakan audit. Ada tujuh tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan auditnya:

- a. Memahami bisnis dan industri klien
- b. Melaksanakan prosedur analitik
- c. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal

- d. Mempertimbangkan resiko bawaan
- e. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama
- f. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan

3. Pelaksanaan pengujian audit

Pada tahap ini biasanya disebut dengan tahap “pekerjaan lapangan”. Tujuan utama pelaksanaan pekerjaan lapangan ini adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas kewajaran laporan keuangan klien.

4. Pelaporan Audit

Pelaksanaan tahap ini harus mengacu ke “standar pelaporan”. Ada dua langkah penting yang dilaksanakan oleh auditor dalam tahap ini adalah menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan, dan menerbitkan laporan audit.

2.2.4 Prosedur Audit Secara Umum

Menurut Agoes (2017) *Audit procedures* adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Menurut Hery (2017) Ada Empat Tahapan dalam proses pengauditan:

1. Merencanakan dan Merancang Suatu Pendekatan Audit

Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko yang berhubungan dengan penerimaan klien dan perencanaan awal, memahami bisnis klien, dan melaksanakan prosedur analitis pendahuluan terutama untuk menilai risiko inheren dan risiko audit bisa diterima. Pada akhir tahap I, auditor harus telah memiliki suatu strategi audit yang terumuskan dengan baik dan rencana serta program audit spesifik untuk keseluruhan audit.

2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi

Pada tahap ini auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Tujuan tahap ini adalah:

- a. Memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian spesifik yang memberi kontribusi terhadap penilaian risiko pengendalian yang dilakukan auditor (yakni, menurunkan risiko pengendalian pada suatu batas tertentu).

- b. Memperoleh bukti untuk mendukung koreksi moneter transaksi Tujuan pertama bisa dicapai dengan melaksanakan pengujian substantif transaksi merupakan penentu utama luasnya pengujian rinci saldo, maka pengujian tersebut seringkali dilakukan secara berbarengan untuk transaksi yang sama.
3. Melaksanakan prosedur Analitis dan Pengujian Rinci Saldo

Tujuan tahap ini adalah untuk memperoleh tambahan bukti yang cukup untuk menentukan apakah saldo akhir dan pengungkapan dalam laporan keuangan telah ditetapkan dengan wajar. Dua kategori umum pada prosedur tahap ini adalah:

 - a. Prosedur analitis substantif yang menilai kewajaran menyeluruh dari transaksi dan saldo
 - b. Pengujian rinci saldo yaitu prosedur audit yang menguji kesalahan penyajian moneter dalam saldo di laporan keuangan.
4. Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan keuangan.

Saat auditor telah melaksanakan semua prosedur audit, penting bagi auditor untuk mengkombinasikan informasi dan seluruh bukti yang telah diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai kewajaran laporan keuangan. Tahap akhir yang dilakukan auditor juga mencakup melakukan uji tambahan untuk penyajian dan pengungkapan, mengevaluasi hasil membuat laporan audit, serta mengkomunikasikan hasil audit pada komite audit dan manajemen perusahaan.

2.2.5 Bukti Audit

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014) Setiap prosedur audit mendapat satu atau lebih jenis-jenis bukti audit. Berikut jenis-jenis bukti audit:

1. Pemeriksaan fisik (*physical examination*)

Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset berwujud. Pemeriksaan fisik adalah cara langsung untuk memverifikasi apakah suatu aset benar-benar ada (tujuan eksistensi) dan pada tingkat tertentu apakah aset yang ada itu telah dicatat (tujuan kelengkapan).
2. Konfirmasi

Konfirmasi menggambarkan penerimaan respons tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Respons yang diberikan dalam bentuk kertas atau elektronik atau media lainnya.

3. Inspeksi

Inspeksi adalah pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji, atau seharusnya tersaji, dalam laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa oleh auditor adalah catatan yang digunakan klien untuk menyediakan informasi bagi pelaksanaan bisnis dengan cara yang terorganisasi, yang bisa juga dalam bentuk kertas, bentuk elektronik, atau media lain. Dokumen ini diklasifikasikan sebagai dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang disiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak luar. Dokumen internal

mencakup faktur penjualan, jam laporan kerja karyawan, dan laporan persediaan. Dokumen eksternal adalah dokumen yang ditangani oleh seorang di luar organisasi klien yang merupakan pihak yang melakukan transaksi, tetapi dokumen tersebut saat ini berada ditangan klien atau dengan segera dapat diakses oleh klien. Dokumen eksternal ini yaitu faktur dari pemasok, wesel bayar yang dibatalkan, dan polis asuransi.

2.2.6 Standar Audit

Di Indonesia standar audit yang berlaku adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yang berisi mengenai panduan audit atas laporan keuangan historis dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Kemudian, PSA dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Standar umum

- a. Audit harus dilakukan seorang auditor yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup.
- b. Sikap independensi harus dipertahankan oleh auditor dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
- c. Dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan, auditor harus menerapkan kemahiran profesionalnya.

2. Standar pekerjaan lapangan
 - a. Auditor harus merencanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan mengawasi kinerja asisten sebagaimana mestinya.
 - b. Auditor harus paham tentang pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu serta lingkup pengujian yang akan dilaksanakan.
 - c. Bukti audit harus diperoleh auditor melalui inspeksi, pengamatan, tanya jawab, dan konfirmasi untuk memberikan pendapat atas laporan yang diaudit.
3. Standar pelaporan
 - a. Laporan harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
 - b. Laporan harus menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip penyusunan laporan keuangan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya.
 - c. Laporan keuangan harus informatif dan memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
 - d. Laporan harus berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau asersi suatu pendapat tidak dapat diberikan.

2.2.7 Materialitas

Menurut *FASB Concept Statement 2* dalam buku Arens dkk (2014) materialitas adalah besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut. Menurut Mulyadi (2017) Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas dapat disimpulkan, materialitas adalah besarnya salah saji

yang dihilangkan baik secara sengaja atau tidak dan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan tersebut.

Menurut SPA 320 dalam SPAP (2013) konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor. Konsep materialitas menggunakan tiga tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat. Tiga tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak Material.
2. Material Tetapi Tidak Mengganggu Laporan Keuangan Secara Keseluruhan.
3. Sangat Material atau Pengaruhnya Sangat Meluas Sehingga Kewajaran Laporan Keuangan Secara Keseluruhan Diragukan.

Dalam Standar akuntansi dan auditing tidak menyediakan pedoman khusus tentang materialitas, maka dari itu auditor harus profesional dalam menentukannya. Materialitas bersifat relatif bukan absolut. Bisa saja salah saji dianggap material bagi perusahaan kecil, tetapi belum tentu berarti bagi perusahaan yang lebih besar. Karena itu diperlukannya tolak ukur atau dasar tertentu untuk menetapkan apakah sejumlah salah saji benar-benar dianggap material.

2.3 Utang Usaha

2.3.1 Definisi Utang Usaha

Menurut Hariyati (2021) Utang usaha adalah pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini pada entitas tertentu, untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa bagi entitas lainya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Utang usaha juga dapat berupa jumlah yang belum di bayarkan atas barang atau jasa yang telah di serahkan atau diselesaikan dari pemasok.

Menurut Rudianto (2013) Utang Usaha adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang / jasa / barang di masa mendatang kepada pihak lain akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu. Menurut Hery (2017) Utang Usaha adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan asset

lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (PSAK) No. 1 Entitas mengklasifikasikan utang usaha sebagai liabilitas jangka pendek jika:

1. entitas memperkirakan akan melunasi liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal.
2. entitas memiliki liabilitas tersebut dengan tujuan utama untuk diperdagangkan.
3. liabilitas tersebut jatuh tempo untuk dilunasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan.
4. entitas tidak memiliki hak tanpa syarat pada akhir periode pelaporan untuk menanggihkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa utang usaha adalah kewajiban perusahaan akibat adanya transaksi pembelian barang atau jasa yang berhubungan dengan oprasional perusahaan dan dibayar secara angsuran dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau satu tahun.

2.3.2 Pengujian substantif utang usaha

Menurut Agoes (2017) Substantive test adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan. Adapun fungsi dari pengujian substantif berkaitan dengan utang usaha antara lain:

1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha.
2. Membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas yang dicantumkan di neraca.
3. Membuktikan hak kewajiban klien atas utang usaha yang dicantumkan di neraca.
4. Membuktikan kewajaran penilaian utang usaha yang dicantumkan di neraca.
5. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca.